

ANALISIS PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM  
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

4  
26/25  
103

Anjas Diwanto Dewo Raharjo, R Slamet Santoso, Ari Subowo

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jln. Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Teleponp (024) 7460058, Faksimile (024) 76480675

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the role of community organization empowerment carried out by the Semarang City National and Political Unity Agency and analyze the factors that hinder in analyzing the role in community organization empowerment carried out by the Semarang City National and Political Unity Agency. This research uses Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning Empowerment of Community Organizations, Law Number 17 of 2013 to analyze the Role in Empowerment and Analysis of factors that hinder the role in empowerment of community organizations. This type of research is descriptive qualitative by using three types of data collection, namely interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the role in empowering community organizations carried out by the Semarang City National Unity and Political Agency still has obstacles in empowering community organizations against mass organizations that are not open to innovation and change in the Semarang City National Unity and Political Agency and the lack of Human Resources in the mass organization supervision team in charge of going to the field so that sometimes not all mass organization activities can be monitored directly on the same day.*

**Keywords:** *Role, Empowerment, Community Organization*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin beberapa hak dasar bagi setiap warganya, termasuk kebebasan berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” menurut Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, bertemu, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” yang selanjutnya menekankan klausul ini. Untuk dapat terlibat dalam proses politik dan penyelenggaraan negara sesuai dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak membentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurut data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, hingga awal tahun 2022, terdapat 343 Ormas yang

terdaftar, di mana 144 di antaranya berbadan hukum dan 199 lainnya tidak berbadan hukum. Organisasi-organisasi ini bergerak di berbagai bidang, termasuk sosial dan budaya, keagamaan, lingkungan dan sumber daya, profesi, ekonomi, dan perdagangan.

**Tabel 1. Jumlah Ormas Di Kota Semarang Tahun 2023**

<b>Bidang</b>	<b>Jumlah Ormas Berbadan Hukum</b>	<b>Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum</b>
Sosial Kebudayaan	85	89
Keagamaan	34	28
Lingkungan dan Sumber Daya	5	46
Profesi	18	21
Ekonomi dan Perdagangan	2	15
Total Jumlah Ormas	144	199

*Sumber: Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2023*

Mayoritas Ormas di Kota Semarang bergerak di bidang sosial, budaya, dan keagamaan, seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi Kota Semarang yang beragam dalam hal budaya, agama, dan kepercayaan. Ormas sering melakukan program kerja atau kegiatan yang sesuai dengan fokus atau bidang utama organisasi

mereka. Namun beberapa Ormas juga melaksanakan tugas yang tidak terkait dengan misi utama mereka. Organisasi dengan banyak fokus biasanya terlibat dalam bidang profesional dan keagamaan.

Selama tahun 2023, setiap tahunnya tercatat adanya pengurangan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa organisasi yang tidak memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan di Kota Semarang, Badan Kesbangpol Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya demi mencapai tujuan strategis. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan pada evaluasi isu dan permasalahan dari capaian kinerja selama periode 2016-2020.

Masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah minimnya pendidikan politik dan fasilitasi pendidikan politik. Lalu kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus Ormas untuk terlibat aktif menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Kurangnya partisipasi Masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Hal tersebut disebabkan

oleh kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus Ormas untuk terlibat aktif dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Berikut ini adalah rincian jumlah Ormas di Kota Semarang yang diketahui tidak aktif dalam kurun waktu 2018-2020.

**Tabel 2. Jumlah Ormas Di Kota Semarang yang Diketahui Tidak Aktif Tahun 2018-2020**

Berbadan Hukum			Tidak Berbadan Hukum		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
14	17	19	5	8	11

*Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan fasilitasi untuk pemberdayaan Ormas. Namun, pemberian bantuan dana atau alokasi anggaran dari pemerintah hingga saat ini masih belum berjalan efektif. Bantuan dana kesekretariatan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kesbangpol sebenarnya bertujuan untuk mendukung Ormas dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional. Sayangnya, implementasi dari upaya ini masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, dana yang direncanakan belum merata, sehingga tidak semua Ormas merasakan manfaatnya dan bantuan cenderung terfokus pada Ormas yang lebih aktif. Kedua, kegiatan pemberdayaan yang

dilakukan oleh Kesbangpol didominasi oleh program sosialisasi yang tidak efektif, dan tanoa adanya pengembangan program yang lebih inovatif dan bervariasi, menyebabkan beberapa Ormas tidak mengetahui cara mengakses bantuan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang?
2. Apa faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Kota Semarang?

### **Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Kota Semarang.
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.

## **KERANGKA TEORI**

### **Administrasi Publik**

administrasi sering diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, yang pada dasarnya merupakan pekerjaan mengendalikan

informasi. Tata usaha juga mencakup berbagai kegiatan seperti menulis, mencatat, menggandakan, dan menyimpan dokumen, yang sering disebut sebagai *clerical work* (Silalahi, 2010: 5). Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kerjasama. Istilah ini merujuk pada kegiatan bersama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama melibatkan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terorganisir dan terarah berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama (Silalahi, 2010: 8).

### **Manajemen Publik**

Manajemen publik, menurut Hughes dalam Sudarmanto dkk. (2020:1), adalah keterlibatan organisasi dalam mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum serta bertanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Fokus manajemen publik, sebagaimana dipaparkan oleh Wijaya dan Danar (2014:2), terletak pada pengendalian cara kerja organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen publik juga berperan dalam mengatur dan mengarahkan sektor publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta kepuasan masyarakat (Sudarmanto et al., 2020:2).

### **Peran Pemerintah**

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2014:34), terdapat empat fungsi pemerintahan, yaitu:

Pelayanan (*Public Service*), Pembangunan (*Development*), Pemberdayaan (*Empowering*), Pengaturan (*Regulation*). Sementara itu, Arif (dalam Nurdin, 2014:69-70) menyebutkan beberapa peran pemerintah, yaitu: Peran Regulator, Peran Fasilitator, Peran Dinamisator, Peran Katalisator.

### **Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**

Pengertian organisasi menurut Sondang P. Siagian (dikutip dalam Sari & Eliana, 2006) adalah “bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita serta terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki, yang di dalamnya terdapat hubungan antaranggota, termasuk pemimpin dan staf atau anggota.” Lebih lanjut, Stephen Robbins (dikutip dalam Sari & Eliana, 2006) menambahkan bahwa “organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan kepemimpinan yang teridentifikasi, bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang.” Dari definisi tersebut, organisasi dapat disimpulkan sebagai sekelompok individu yang memiliki hubungan dan cita-cita bersama di bawah suatu naungan, bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada pada Kota Semarang dengan memiliki konsentrasi peran dalam pemberdayaan organisasi masyarakat. Studi ini berfokus pada Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* guna memperoleh subjek penelitian dengan pemberdayaan Organisasi Masyarakat Kota Semarang. Data yang didapat dari subjek penelitian kemudian dilakukan triangulasi dengan data dari organisasi pelaksana agar data yang didapat dapat dinyatakan benar/sahih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Peran Regulator**

Bakesbangpol telah melaksanakan perannya sebagai regulator dengan optimal. Terlihat dari bagaimana Bakesbangpol mampu melahirkan aturan yang komprehensif, dan menciptakan ruang untuk terbentuknya FKSB sebagai wadah bagi ormas untuk berkoordinasi dengan

pemerintah, dan untuk meningkatkan sinergitas antar ormas.

Regulasi yang dihasilkan oleh Bakesbangpol masih menghadapi beberapa kendala dalam pengimplementasiannya yang memengaruhi efektivitas.

### **B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Peran Fasilitator**

Bakesbangpol telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana melalui mekanisme seperti forum dialog, koordinasi rutin, dan laporan kegiatan. Beberapa fasilitas fisik yang diberikan mencakup ruang pertemuan dan bantuan administratif, sedangkan fasilitas non-fisik terlihat dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas dan dukungan teknologi.

Fasilitas yang diberikan tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan operasional ormas dan dapat diakses secara adil oleh semua pihak. Dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan pelibatan ormas secara lebih inklusif.

### **C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Peran Dinamisator**

Bakesbangpol berusaha untuk memastikan bahwa peran penggerak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ormas di Kota Semarang melalui forum dialog, survei, dan evaluasi program yang telah berjalan.

Bakesbangpol telah berupaya mengoptimalkan peran dinamisator melalui

pemetaan kebutuhan ormas dan penyediaan ruang partisipasi.

Bakesbangpol berupaya untuk memastikan inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan melakukan evaluasi, koordinasi, dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk ormas. Hal ini menunjukkan usaha untuk menjadikan inovasi bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ormas di lapangan.

### **D. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Peran Katalisator**

Rutin mengadakan pertemuan dan forum diskusi untuk mendengarkan tantangan dan kebutuhan ormas. Selain itu, Bakesbangpol melibatkan ormas dalam tahap perencanaan dan evaluasi program, agar ormas dapat memberikan masukan konstruktif.

Upaya Bakesbangpol untuk melibatkan ormas dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi telah berjalan dengan baik, dengan forum-forum diskusi yang sering diadakan untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan ormas. Pendekatan inklusif ini memfasilitasi pertukaran ide yang relevan dan responsif terhadap kondisi lokal, yang berdampak positif dalam mendorong perubahan yang diinginkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melihat pada pemaparan mengenai peran yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol dalam pemberdayaan Ormas terdapat peran yang sudah terlaksana cukup baik yakni sebagai :

1. Peran regulator Bakesbangpol telah menetapkan regulasi yang mengatur keberadaan, hak, kewajiban, serta pembinaan Ormas berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 berkaitan tentang pedoman bagi Ormas dalam menjalankan aktivitas, lalu dilakukannya pembentukan Forum Komunikasi dan Sinergi Bersama (FKSB) yang menjadi wadah koordinasi antar Ormas dan pemerintah guna menghindari tumpang tindih dan Bakesbangpol melakukan sosialisasi dan penyuluhan regulasi.
2. Peran fasilitator sudah melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan Ormas, termasuk ruang pertemuan, pemberian pelatihan, bantuan administratif, bimbingan teknis dan pendampingan teknis.
3. Peran dinamisor telah berupaya mendorong partisipasi aktif Ormas melalui pemetaan kebutuhan, forum diskusi, evaluasi program, survei kebutuhan serta kolaborasi dengan Ormas dalam perencanaan program.

4. Peran katalisator sudah cukup berperan dalam mempercepat perubahan dengan mengembangkan program-program pemberdayaan Ormas dan melakukan penyelenggaraan program pemberdayaan Ormas dan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi.

Ditemukan pula peran yang belum optimal dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dalam pemberdayaan Ormas di Kota Semarang, peran yang belum dilakukan sebagai :

1. Peran regulator dalam penyederhanaan birokrasi untuk pengajuan bantuan dan perizinan dan penguatan pengawasan dan evaluasi kebijakan.
2. Peran fasilitator dalam pemerataan akses fasilitas bagi semua Ormas, penyediaan bantuan keuangan atau pendanaan bagi Ormas belum merata.
3. Peran dinamisor belum melakukan peningkatan implementasi hasil konsultasi terkait aspirasi Ormas, mendorong kemandirian Ormas secara berkelanjutan.
4. Peran katalisator belum menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik Ormas terkesan bersifat umum dan memastikannya keberlanjutan program.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator yang dijalankan oleh Bakesbangpol dalam pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas) di Kota Semarang, berikut adalah saran untuk peningkatan efektivitas peran tersebut:

1. Membangun platform digital terpadu yang memungkinkan ormas mengajukan bantuan dan perizinan secara online. Sistem ini dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalisir kendala birokrasi.
2. Menerapkan pendekatan afirmatif dengan memberikan prioritas akses fasilitas bagi ormas kecil dan di wilayah pinggiran. Fasilitas seperti ruang pertemuan, alat pelatihan, dan bantuan teknologi perlu disebar secara merata.
3. Mendorong ormas untuk mengembangkan usaha produktif atau mengakses dana dari CSR perusahaan swasta sebagai upaya meningkatkan kemandirian keuangan mereka.
4. Menyusun rencana jangka panjang dengan dukungan anggaran berkelanjutan, sehingga program tidak terhenti di tengah jalan. Penguatan kerja sama dengan lembaga donor dan sektor swasta dapat menjadi alternatif sumber dana.

Dengan mengoptimalkan peran regulator, fasilitator, dinamisor, dan

katalisator secara terintegrasi, diharapkan Bakesbangpol Kota Semarang dapat lebih efektif dalam memberdayakan ormas. Langkah-langkah di atas perlu didukung oleh komitmen anggaran, kebijakan yang adaptif, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M., & Wafa, M. A. (2021). Pengawasan pemerintah terhadap penyalahgunaan lembaga swadaya masyarakat. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2).
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo*, 3(1), 31-40.
- Haeranah. (2024). Analisa Administrasi Tahapan Kebijakan Guna Menunjang Pelayanan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 16 No. 2 pp. 176-186.
- Hasan, A. R. (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hayati, S. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang*

- Disabilitas di Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hayati, K. R., Nisak, I., Suyanto, A. T. S., & Bimantio, M. A. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(1), 11-16.
- Ihsan, H. N. (2022). Pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan ormas terhadap manajemen pembinaan ormas untuk mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(1), 17–25.
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 151–162. <https://ejournal.umus.ac.id/index.php/JIIA>
- Kusumawardhana, I. (2023). A dynamic system approach: Modalitas kontrol pemerintah terhadap agenda pembangunan di negara berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).
- Lase, E. Lase, H. (2024). Implementasi Sistem Monitoring dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Spmdp2a Kabupaten Nias. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 5, No. 4, Juni–Juli 2024
- Latif, S., Harman, A., & Dewi, Y. Y. (2022). Analisis faktor penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan di Dinas P3APM Kota Pekanbaru pada bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan.
- Mamokhere, J. (2022). *Accountability, inclusivity, effectiveness, and leaving no one behind: An exploration of effective governance principles in ensuring clean water and sanitation in South African municipalities*. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE 11(10)(2022) 191-205
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis, dan manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Raintung, A., Sampiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194-201.
- Sari, L. G., Noor, I., & Hidayati, F. (2023). Efektivitas reformasi birokrasi terhadap pencapaian tujuan organisasi (studi kasus pada BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(3), 146–150.
- Suwana, F. (2017). Lily. “Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy.” *Kasetsart: Journal of Social Sciences*, 38.
- WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH. (n.d.).

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(1), 17–26.

Widodo, J. (2019). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan transparansi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.